

Analisis pengaruh usia harapan hidup, indeks pendidikan, dan PDRB terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat

Baiquni, Nur Feriyanto*

Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding author: nur.feriyanto@uui.ac.id

JEL Classification Code:

I32, O15, R11

Kata kunci:

Kemiskinan; Usia harapan Hidup; Pendidikan; PDRB

Email penulis:

20313196@students.uui.ac.id

DOI:

10.20885/JKEK.vol4.iss1.art1

Abstract

Purpose – This study analyzes the influence of Life Expectancy, Education Index, and Gross Regional Domestic Product (GRDP) on the Poverty Rate in West Java Province.

Methods – This study uses secondary data in the form of panel data from regencies/cities in West Java Province for the period 2011-2023. Panel data regression analysis was applied, with the best model selected using the Chow and Hausman tests. The test results indicate that the Fixed Effects Model (FEM) is the most appropriate model for this data.

Findings – The Education Index has a negative and significant effect on the Poverty Rate. Economic Growth Rate and Life Expectancy do not have a partial effect on the Poverty Rate.

Implication – Government policies that focus on improving access to and quality of education are crucial for reducing poverty. Furthermore, efforts are needed to create new jobs and increase community income through economic development.

Originality – This study analyzes poverty and can serve as a reference for stakeholders in addressing poverty issues in West Java.

Abstrak

Tujuan – Penelitian ini menganalisis pengaruh Usia Harapan Hidup, Indeks Pendidikan, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.

Metode – Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data panel dari kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2011-2023. Metode analisis regresi data panel diterapkan, dengan pemilihan model terbaik melalui Uji Chow dan Uji Hausman. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Fixed Effect Model (FEM) adalah model yang paling sesuai untuk data ini.

Temuan – Indeks Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Usia Harapan Hidup tidak berpengaruh secara parsial terhadap Tingkat Kemiskinan.

Implikasi – Pentingnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan untuk menekan angka kemiskinan. Selain itu, diperlukan upaya untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan ekonomi.

Orisinalitas – Penelitian ini menganalisis kemiskinan dan dapat menjadi rujukan bagi pemangku kebijakan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di Jawa Barat.

Pendahuluan

Kemiskinan adalah masalah global yang telah ada sejak awal peradaban dan terus menjadi isu krusial yang membutuhkan perhatian serta solusi berkelanjutan dari pemerintah di berbagai negara. Fenomena ini bersifat multidimensional, tidak hanya terbatas pada ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan kesehatan, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap ekonomi, politik, sosial budaya, dan partisipasi dalam masyarakat. Menurut Susanto & Pangesti (2019), kemiskinan merupakan permasalahan klasik yang telah mengakar dalam sejarah manusia sejak awal peradaban. Ketidakmampuan jutaan orang untuk memenuhi kebutuhan dasar menciptakan lingkaran setan yang menghambat kemajuan dan memicu berbagai krisis sosial. Yulianto (2023) juga menyatakan bahwa kemiskinan bukan hanya masalah individu atau negara, tetapi ancaman nyata bagi stabilitas dan kemakmuran global. Kemiskinan tidak hanya dilihat sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga keterbatasan seseorang atau komunitas untuk berkembang dan meningkatkan taraf hidupnya (Arsyad, 2010). Berbagai kebijakan dan program yang ada dirasakan masih kurang efektif dalam upaya menurunkan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, terbukti dengan adanya kecenderungan peningkatan jumlah penduduk miskin dari masa ke masa (Anita Rahman, 2019).

Di Indonesia, meskipun telah mengalami kemajuan ekonomi yang signifikan, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan besar. Berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dirasakan masih kurang efektif, terbukti dengan kecenderungan peningkatan jumlah penduduk miskin dari waktu ke waktu.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023 mencapai 25,90 juta orang. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan September 2022 (26,36 juta orang) dan Maret 2022 (26,16 juta orang). Persentase penduduk miskin juga menurun menjadi 9,36% pada Maret 2023, dari 9,57% pada September 2022 dan 9,54% pada Maret 2022. Meskipun tren ini positif, angka kemiskinan di Indonesia masih tergolong tinggi, sehingga memerlukan upaya berkelanjutan.

Tingkat kemiskinan di Indonesia tidak merata di seluruh wilayah. Data BPS (2023) menunjukkan bahwa pada Maret 2023, persentase penduduk miskin terbesar berada di Pulau Maluku dan Papua (19,68%), sedangkan terendah di Pulau Kalimantan (5,67%). Namun, dari segi jumlah, sebagian besar penduduk miskin (13,62 juta orang) masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara Pulau Kalimantan memiliki jumlah terendah (0,97 juta orang).

Tabel 1. Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Menurut Pulau pada Maret 2023

Pulau	Persentase Penduduk Miskin (%)			Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang)		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
Sumatera	7,79	10,33	9,27	2,20	3,47	5,67
Jawa	7,40	11,81	8,79	7,85	5,77	13,62
Bali dan Nusa Tenggara	8,50	17,73	13,29	0,65	1,44	2,09
Kalimantan	4,45	6,88	5,67	0,38	0,59	0,97
Sulawesi	5,87	13,16	10,08	0,50	1,54	2,04
Maluku dan Papua	6,13	26,73	19,68	0,16	1,35	1,51
Indonesia	7,29	12,22	9,36	11,74	14,16	25,90

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Di Pulau Jawa, tiga dari enam provinsi memiliki tingkat kemiskinan tertinggi: DI Yogyakarta (11,04%), Jawa Tengah (10,77%), dan Jawa Timur (10,35%) (BPS, 2023). Meskipun pembangunan ekonomi terpusat di Pulau Jawa, setengah dari provinsinya masih menghadapi masalah kemiskinan. Provinsi Jawa Barat berada di urutan keempat dengan tingkat kemiskinan 7,62%. Ini menjadi sorotan karena Jawa Barat adalah salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di Indonesia dengan angka 5,25% lebih tinggi dibandingkan angka nasional yaitu 5,17% (Bank Indonesia, 2023), namun tingkat kemiskinannya masih tinggi.

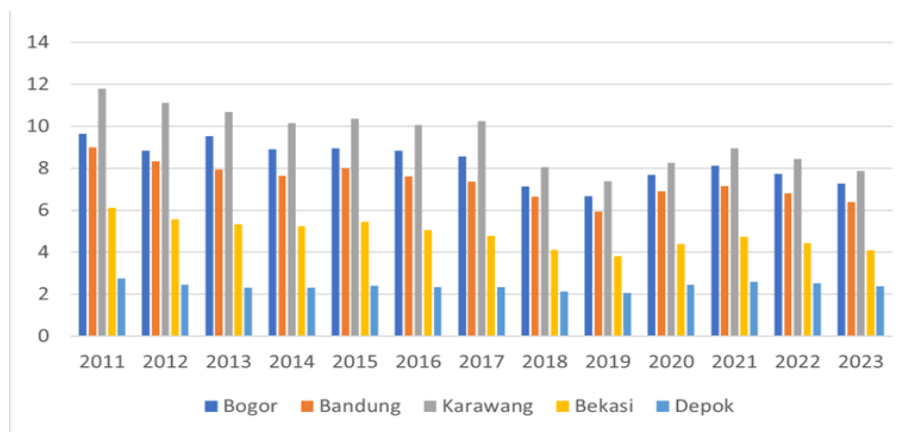
Provinsi Jawa Barat, dengan 18 Kabupaten dan 9 Kota, memiliki kompleksitas masalah kemiskinan yang ditandai oleh kesenjangan antar wilayah dan kota. Mayoritas Kabupaten/Kota memiliki jumlah penduduk miskin yang tinggi, dengan hanya beberapa yang tergolong rendah.

Perbedaan signifikan ini menjadi indikator penting bagi pemerintah dalam merumuskan strategi pengentasan kemiskinan yang tepat.

Tabel 1. Persentase Penduduk Miskin di Pulau Jawa Menurut Provinsi pada Maret 2023

No.	Provinsi	Tingkat Kemiskinan (%)
1	DKI Jakarta	4,44
2	Banten	6,17
3	Jawa Barat	7,62
4	Jawa Timur	10,35
5	Jawa Tengah	10,77
6	DI Yogyakarta	11,04

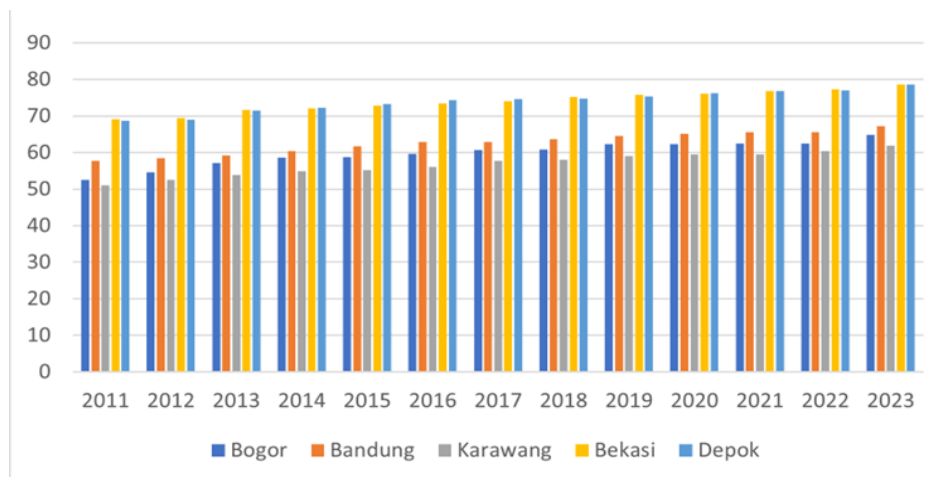
Sumber: BPS, 2023



Gambar 1. Persentase Penduduk Miskin menurut 5 Kota Besar di Provinsi Jawa Barat

Gambar 1. menunjukkan fluktuasi tingkat kemiskinan di lima kota besar Jawa Barat (Bandung, Bekasi, Bogor, Karawang, dan Depok) selama lebih dari 10 tahun. Pada tahun 2023, Depok memiliki tingkat kemiskinan terendah, sedangkan Karawang tertinggi. Fluktuasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks yang saling terkait dan perlu dianalisis lebih lanjut.

Salah satu faktor yang diduga berkontribusi terhadap tingginya angka kemiskinan, khususnya di kota-kota besar Jawa Barat, adalah tingkat pendidikan. Kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas menghambat peluang individu untuk mendapatkan pekerjaan layak dan meningkatkan pendapatan. Menurut Karnani (2011), di negara-negara berkembang, pasokan penduduk terpelajar seringkali melebihi jumlah lapangan kerja yang tersedia, menyebabkan peningkatan pengangguran di kalangan generasi muda berpendidikan.



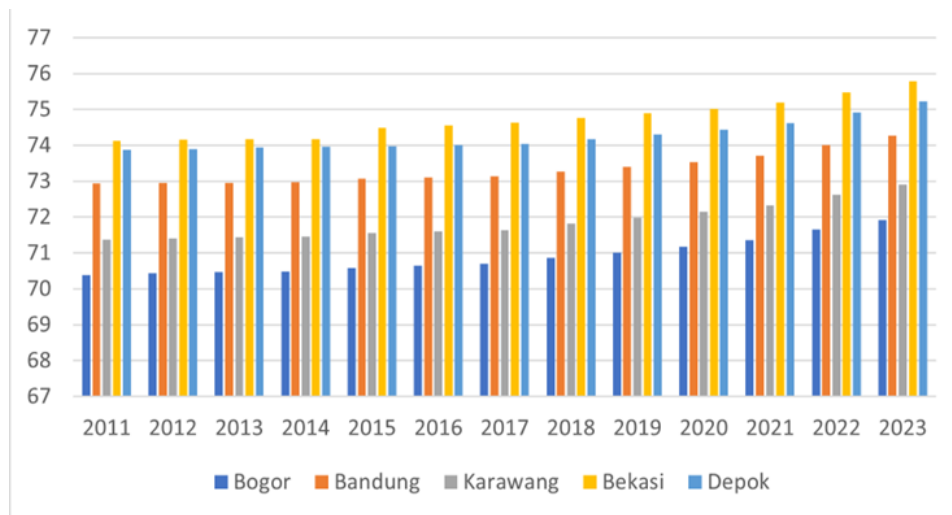
Sumber: BPS, 2023 Data diolah

Gambar 1. Indeks Pendidikan 5 Kota Besar di Provinsi Jawa Barat

Gambar 2. menunjukkan bahwa indeks pendidikan kota-kota besar di Jawa Barat mengalami kenaikan setiap tahun. Depok mendominasi indeks tertinggi, sementara Karawang memiliki indeks terendah. Peningkatan pendidikan diharapkan terus berlanjut karena memegang peranan penting dalam pengentasan kemiskinan jangka panjang, baik melalui peningkatan produktivitas maupun pelatihan keterampilan bagi kelompok miskin (Arsyad, 2010).

Usia Harapan Hidup

Selain tingkat pendidikan, kemiskinan juga disebabkan oleh Usia Harapan Hidup (UHH) yang terus meningkat. Peningkatan UHH menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk usia lanjut yang tidak lagi produktif, sehingga beban ekonomi yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif menjadi lebih besar. Hal ini dapat memperburuk kondisi ekonomi keluarga, terutama jika tidak ada sistem jaminan sosial yang memadai. Menurut laporan dari Badan Pusat Statistik (2023), peningkatan Usia Harapan Hidup di Indonesia pada tahun-tahun terakhir ini belum diimbangi dengan peningkatan lapangan pekerjaan dan layanan kesehatan yang memadai, yang akhirnya berkontribusi terhadap tingginya angka kemiskinan.



Sumber: BPS, 2023 Data diolah

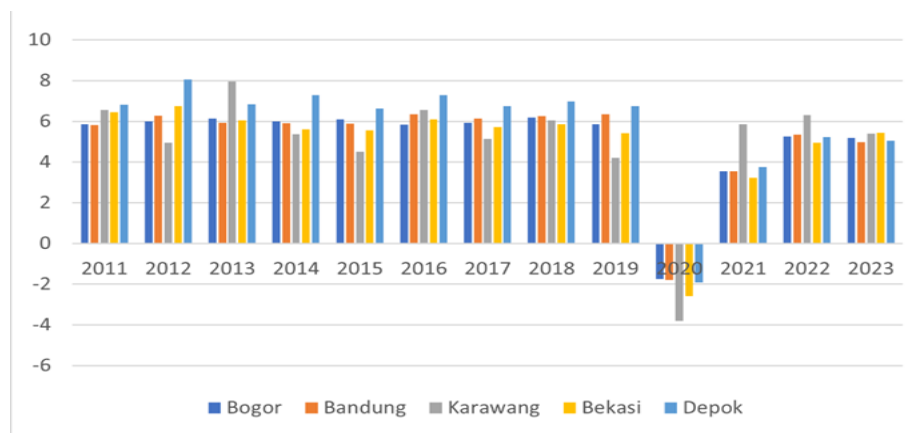
Gambar 2. Usia Harapan Hidup 5 Kota Besar di Provinsi Jawa Barat

Gambar 3. menunjukkan bahwa UHH di lima kota besar Jawa Barat cenderung meningkat setiap tahun. Bekasi memiliki UHH tertinggi, sedangkan Depok dan Karawang terendah. Peningkatan UHH dapat menyebabkan peningkatan kemiskinan karena lebih banyak orang hidup lebih lama, yang meningkatkan beban ekonomi bagi keluarga, terutama bagi keluarga miskin yang mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga yang lebih banyak. Namun, diharapkan peningkatan UHH diimbangi dengan perbaikan kualitas hidup dan kesempatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Setiap daerah berupaya meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) setiap tahun karena PDRB yang tinggi menunjukkan keberhasilan pembangunan ekonomi dan meningkatnya produksi serta permintaan masyarakat. Hal ini berarti pendapatan dan pengeluaran masyarakat bertambah, meningkatkan taraf hidup mereka dan membantu mengurangi kemiskinan. Namun, jika distribusi pendapatan tidak merata, PDRB yang tinggi tidak akan efektif dalam mengurangi kemiskinan dan malah bisa menyebabkan ketimpangan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan peningkatan PDRB yang berimbang dan merata.

Berdasarkan data di Gambar 4., terlihat bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) di lima kota besar Provinsi Jawa Barat mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, Karawang tercatat memiliki PDRB tertinggi, sedangkan Bekasi memiliki PDRB terendah. Meskipun beberapa kota mengalami peningkatan PDRB, hal ini tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan angka kemiskinan. Peningkatan PDRB menunjukkan kinerja ekonomi yang

positif, namun perlu ditelaah lebih dalam mengapa hal ini tidak berdampak langsung pada pengentasan kemiskinan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di 5 kota besar di Provinsi Jawa Barat.



Sumber: BPS, 2023 Data diolah

Gambar 4. Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) 5 Kota Besar di Provinsi Jawa Barat

Beberapa penelitian terkait kemiskinan telah dilakukan diantaranya, Feriyanto et al., (2020) meneliti pengaruh pengangguran, upah minimum, dan PDRB riil terhadap kemiskinan di provinsi-provinsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan model analisis data panel dengan model terbaiknya adalah *Fixed Effect Model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangguran mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan PDRB riil mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap kemiskinan di provinsi-provinsi di Indonesia. Secara bersama-sama, variabel pengangguran, upah, dan PDRB riil juga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di provinsi-provinsi di Indonesia. Kebijakan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan perlu mempertimbangkan faktor-faktor ini dengan strategi yang tepat untuk mengatasi pengangguran, meningkatkan upah minimum, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Fitria et al. (2021) dalam penelitiannya menemukan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah kemiskinan di Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, semakin rendah tingkat kemiskinannya. Temuan ini sejalan dengan teori ekonomi yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan taraf hidup. Peningkatan pendapatan dan lapangan pekerjaan memungkinkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan keluar dari lingkaran kemiskinan. Penelitian ini menggunakan data panel dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat selama periode 2013-2020 dengan metode regresi data panel dan model fixed effect. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi kebijakan pengentasan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. Pemerintah daerah perlu fokus pada upaya-upaya yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan investasi, mengembangkan infrastruktur, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan mendorong pertumbuhan ekonomi, diharapkan jumlah kemiskinan di Provinsi Jawa Barat dapat dikurangi dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan.

Penelitian oleh Bancin & Usman (2020) mengungkapkan bahwa di Provinsi Aceh, selama periode 2017-2021, Usia Harapan Hidup (UHH) tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini berbeda dengan penelitian di daerah lain yang menunjukkan hubungan positif antara UHH dan tingkat kemiskinan. Menurut peneliti, terdapat beberapa faktor yang dapat menjelaskan mengapa UHH tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Pertama, terdapat variasi tingkat kemakmuran dan kesejahteraan, terutama dalam hal kesehatan, di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Kedua, faktor-faktor seperti gizi, kualitas

pelayanan kesehatan, dan aksesibilitas layanan kesehatan yang berbeda-beda di setiap daerah juga dapat menjadi penyebab tidak adanya hubungan antara UHH dan tingkat kemiskinan. Temuan ini menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Barat tidak hanya fokus pada peningkatan AHH, tetapi juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti gizi, kualitas pelayanan kesehatan, dan aksesibilitas layanan kesehatan.

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya, tingkat pendidikan juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. Hal ini dibuktikan oleh penelitian Salsabil & Riani (2023) yang menggunakan metode regresi data panel dengan uji *fixed effect model* dan menemukan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Barat. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan di suatu daerah, semakin rendah pula tingkat kemiskinannya. Penyebabnya karena pendidikan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan individu, sehingga mereka memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan gaji yang lebih tinggi. Temuan penelitian ini sejalan dengan teori ekonomi yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah perlu fokus pada upaya-upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Jawa Barat.

Melihat permasalahan kemiskinan yang masih ada di lima kota besar Provinsi Jawa Barat, peneliti ingin melakukan penelitian untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan tersebut. Tujuannya adalah agar hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah di tiap kabupaten/kota sebagai dasar dalam mengambil kebijakan yang tepat untuk mengentaskan kemiskinan di wilayahnya.

Metode Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti, melainkan diperoleh dari sumber lain yang sudah ada. Dalam hal ini, data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel untuk mengevaluasi pengaruh dari gabungan dua jenis data *time series* dan *cross section*. Data *time series* diatur berdasarkan urutan waktu seperti harian, bulanan, tahunan, atau kuartalan, sementara data *cross section* dikumpulkan pada waktu yang sama dari beberapa daerah, perusahaan, atau perorangan. Penggabungan ini dilakukan untuk meningkatkan jumlah data yang tersedia dan mendapatkan derajat kebebasan yang lebih besar.

Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2011 hingga 2023. Tingkat Kemiskinan adalah salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam penelitian ini, Tingkat Kemiskinan dinyatakan sebagai Y dalam satuan persen. Dalam penelitian ini, variabel yang akan dianalisis meliputi Indeks Pendidikan, Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), dan Usia Harapan Hidup. Variabel Tingkat Pendidikan dalam penelitian ini menggunakan indeks pendidikan sebagai indikator, yang mengukur seberapa besar akses pendidikan setiap individu dimulai sejak usia tujuh tahun dan berfungsi sebagai ukuran lamanya masa sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan diperoleh oleh anak di masa depan (BPS). Angka ini dihitung dengan membagi jumlah partisipasi penduduk dalam usia (a) pada tahun (t) dengan jumlah total penduduk yang bersekolah pada usia (a) pada tahun (t) dalam satuan persen. Variabel Laju Pertumbuhan Ekonomi dalam penelitian ini menggunakan PDRB sebagai indikator, yang mencerminkan nilai agregat dari barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah (provinsi) dalam periode tertentu (biasanya satu tahun). PDRB menggambarkan nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi di wilayah tersebut, termasuk industri, pertanian, perdagangan, dan jasa dalam satuan persen. Variabel Usia Harapan Hidup (UHH) di Provinsi Jawa Barat didefinisikan sebagai rata-rata usia yang dapat dicapai oleh penduduk Jawa Barat yang lahir antara tahun 2011 hingga 2023, dihitung berdasarkan data kematian menurut kelompok usia di Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan metode langsung, data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat dalam satuan tahun.

Persamaan dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

Dimana:

Y = Tingkat Kemiskinan;

X1 = Usia Harapan Hidup;

X2 = Indeks Pendidikan;

X3 = Laju Pertumbuhan Ekonomi;

i = *cross section* ;

t = *time series*

Hasil dan Pembahasan

Sebelum dilakukan uji statistik, terlebih dahulu dilakukan uji pemilihan model untuk menentukan model terbaik antara *common effect*, *fixed effect* dan *random effect* dengan menggunakan uji *chow* dan uji *hausman*.

Tabel 3. Hasil Uji Chow dan Uji Hausman

Hasil Uji Chow			
Effect Test	Test Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	26.727455	(4,52)	0.0000
Cross-section Chi-square	67.025574	4	0.0000
Hasil Uji Hausman			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f	Prob.
Cross-section random	106.834295	3	0.0000

Berdasarkan hasil pengujian Chow dan Hausman pada Tabel 3 ditunjukkan bahwa pada hasil uji chow di atas, nilai probabilitas *cross-section chi-square* sebesar 0.0000 yang lebih kecil dari 0,05 ($\alpha = 5\%$), artinya, menolak hipotesis nol dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model yang dipilih adalah *fixed effect*. Berdasarkan hasil uji Hausman dengan nilai probabilitas *crosssection random* sebesar 0.0000 yang jauh lebih kecil dari tingkat signifikansi ($\alpha = 5\%$), hal ini berarti kita menolak H0 sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang lebih baik untuk digunakan adalah *Fixed Effect Model*.

Tahap pengujian selanjutnya yakni uji kebaikan garis regresi. Berdasarkan hasil regresi diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,959985 menunjukkan bahwa gabungan dari Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Indeks Pendidikan, dan Usia Harapan Hidup mampu menjelaskan sebanyak 95,99% variasi dalam model tersebut. Sisanya, sekitar 4,01%, dapat dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model tersebut. Ini berarti model yang digunakan secara kuat mampu menjelaskan sebagian besar variasi yang diamati dalam data. Pada tahap berikutnya dilakukan uji kelayakan model dengan menggunakan uji F. Berdasarkan hasil uji F, nilai probabilitas (f-statistic) sebesar $0,0000 < 0,05$ (dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$), yang berarti kita menolak H0. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama atau simultan, variabel-variabel tersebut mempengaruhi tingkat kemiskinan. Ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari variabel-variabel tersebut terhadap kemiskinan.

Tabel 4. Hasil *Fixed Effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	17.17286	21.56591	0.796297	0.4292
PDRB	-0.024933	0.033173	-0.751603	0.4554
Indeks Pendidikan	-0.244495	0.051103	-4.784361	0.0000
Usia Harapan Hidup	0.074605	0.333613	0.223628	0.8239
Effects Specification				
R-squared	0.959985	Mean dependent var		6.481077
Adjusted R-squared	0.954269	S.D. dependent var		2.714068
F-statistic	167.9345			
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Hasil Olah Data *Eviews 12*

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahap terakhir dilakukan uji individu dengan menggunakan uji t. Berdasarkan hasil uji parsial, dengan nilai probabilitas sebesar 0,4554 yang lebih besar dari taraf signifikansi ($\alpha = 5\%$), artinya gagal menolak H_0 . Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa secara parsial, variabel Laju pertumbuhan Ekonomi (PDRB) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan, penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2021). Dalam studi tersebut, pertumbuhan PDRB per kapita pada periode 2011-2020 ditemukan memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Variabel PDRB tidak berdampak signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini menunjukkan meskipun peningkatan PDRB mencerminkan pertumbuhan ekonomi, tetapi efek yang dihasilkan tidak secara langsung mengurangi tingkat kemiskinan dengan signifikan. Namun demikian, peningkatan PDRB biasanya berdampak positif pada aktivitas ekonomi di berbagai sektor industri.

Kondisi ini menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat, sehingga mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan individu. Hasil temuan ini bertentangan dengan hipotesis awal tetapi selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2021). Dalam studi tersebut, pertumbuhan PDRB per kapita pada periode 2011-2020 ditemukan memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Indeks Pendidikan

Berdasarkan hasil uji parsial yang menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari taraf signifikansi ($\alpha = 5\%$), penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa terdapat bukti kuat untuk menolak hipotesis nol (H_0). Hal ini menunjukkan bahwa variabel indeks pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap tingkat kemiskinan. Dengan demikian penemuan ini konsisten dengan hipotesis dan temuan penelitian Salsabil & Rianti (2023), yang menunjukkan bahwa indeks pendidikan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2016 hingga 2020. Variabel indeks pendidikan memainkan peran penting dalam menjelaskan variasi kemiskinan yang diamati dalam model ini.

Nilai koefisien variabel indeks pendidikan sebesar -0,0244495 artinya jika indeks pendidikan naik 1% maka tingkat kemiskinan akan menurun sebesar 0,0244495%. Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan tinggi memberikan individu keterampilan dan pengetahuan yang lebih baik, serta membuka lebih banyak peluang kerja yang menjanjikan.

Individu dengan pendidikan tinggi umumnya memiliki daya nalar yang lebih kritis, kemampuan problem solving yang lebih efektif, serta mampu berkomunikasi dengan lebih baik. Kemampuan-kemampuan ini sangat dicari di dunia kerja, sehingga mereka memiliki keunggulan untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji lebih tinggi dan peluang untuk naik jabatan yang lebih besar. Selain itu, pendidikan tinggi juga membuka akses ke jaringan profesional yang lebih luas, membantu individu untuk mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan, membangun hubungan dengan para profesional dalam bidang mereka, dan mendapatkan mentor yang dapat membimbing karir mereka.

Penemuan ini konsisten dengan hipotesis dan temuan penelitian Salsabil & Rianti (2023), yang menunjukkan bahwa indeks pendidikan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2016 hingga 2020.

Usia Harapan Hidup

Berdasarkan hasil uji parsial, dengan nilai probabilitas sebesar 0,8239 yang lebih besar dari nilai signifikansi yakni 0,05 ($\alpha = 5\%$), hal ini berarti tidak ada cukup bukti untuk menolak H_0 . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara parsial, variabel usia harapan hidup tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan dan Hasil ini sejalan dengan penelitian Santoso et al., (2022) yang menemukan bahwa usia harapan hidup tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Barat.

Variabel usia harapan hidup tidak berdampak signifikan pada kemiskinan. Hal ini dikarenakan terdapat variasi tingkat kemakmuran dan kesejahteraan di berbagai kabupaten/kota di

Provinsi Jawa Barat. Variasi yang berbeda ini yang menyebabkan tidak adanya hubungan antara Usia Harapan Hidup dengan Tingkat Kemiskinan. Dalam konteks penelitian ini, hasil menunjukkan bahwa peningkatan usia harapan hidup sesuai hipotesis. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya Santoso et al., (2022) yang menemukan bahwa usia harapan hidup tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Barat. Faktor-faktor lain dinilai lebih dominan dalam memengaruhi tingkat kemiskinan, sehingga peningkatan usia harapan hidup tidak dapat dijadikan indikator utama dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Kesimpulan dan Implikasi

Kesimpulan

Variabel PDRB tidak berdampak terhadap kemiskinan. Ini menunjukkan bahwa peningkatan PDRB yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi biasanya diikuti oleh peningkatan aktivitas di berbagai sektor industri. Temuan ini bertentangan dengan hipotesis awal tetapi selaras dengan penelitian Putra (2021). Dalam studi tersebut, pertumbuhan PDRB per kapita pada periode 2011-2020 ditemukan memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Indeks pendidikan secara parsial berpengaruh terhadap kemiskinan indeks pendidikan sebesar -0,0244495 artinya jika indeks pendidikan naik 1% maka tingkat kemiskinan akan menurun sebesar 0,0244495%. Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan tinggi memang membekali individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang lebih mumpuni, membuka pintu gerbang menuju peluang kerja yang lebih luas dan menjanjikan Hal ini sesuai dengan hipotesis dan selaras dengan penelitian (Iqbal Salsabil & Westi Rianti, 2023) Indeks Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016-2020.

Variabel usia harapan hidup tidak berdampak pada kemiskinan dan sesuai hipotesis yang menunjukkan bahwa temuan ini selaras dengan Santoso et al. (2022) bahwa variabel Usia Harapan Hidup tidak signifikan berpengaruh terhadap persentase penduduk miskin. Hal ini disebutkan oleh faktor-faktor lain yang lebih dominan dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Implikasi

Variabel PDRB tidak berdampak terhadap kemiskinan. Ini menunjukkan bahwa peningkatan PDRB yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi biasanya diikuti oleh peningkatan aktivitas di berbagai sektor industri. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan serta penyediaan pelatihan kerja yang relevan sangat penting untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja.

Variabel Indeks Pendidikan secara parsial berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, Dengan adanya Peningkatan akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat, terutama di daerah terpencil, merupakan langkah penting untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Pengembangan ekonomi dan kewirausahaan merupakan langkah penting untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta kualitas hidup. Pemerintah perlu mendorong sektor ekonomi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui berbagai kebijakan dan program yang membantu mengembangkan untuk seluruh kalangan usia agar terhindar dari pengangguran.

Daftar Pustaka

- Anita Rahman, P. (n.d.). KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF ILMU SOSIOLOGI.
- Arsyad, L. (2010). Ekonomi Pembangunan (4th ed.). STIE YKPN.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023.
- Bancin, S. K., & Usman, U. (2020). Pengaruh AHH, AHLS Dan PDRB Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Aceh. Jurnal Ekonomika Indonesia, XI.
- Bank Indonesia. (2023). Laporan Perekonomian Jawa Barat Triwulan II 2023.

- Feriyanto, N., El Aiyubbi, D., & Nurdany, A. (2020). The Impact of Unemployment, Minimum Wage, and Real Gross Regional Domestic Product on Poverty Reduction in Provinces of Indonesia. In *Asian Economic and Financial Review* (Vol. 10, Issue 10, pp. 1088–1099). Asian Economic and Social Society. <https://doi.org/10.18488/journal.aefr.2020.1010.1088.1099>
- Fitria, S. F., Suhaedi, D., & Permanasari, Y. (2021). Analisis Regresi Data Panel Pengaruh PDRB, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Jumlah Kemiskinan di Kabupaten/Kota di Jawa Barat pada Tahun 2013-2020. *Jurnal Riset Matematika*, 1(2), 119–128. <https://doi.org/10.29313/jrm.v1i2.377>
- Iqbal Salsabil, & Westi Rianti. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan dan Laju Pertumbuhan Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2016 – 2020. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 15–24. <https://doi.org/10.29313/jrieb.v3i1.1886>
- Karnani, A. (2011). Reducing Poverty through Employment. *Innovations: Technology, Governance, Globalization*, 6(2), 73–97. https://doi.org/https://doi.org/10.1162/INOV_a_00071
- Putra Hendy Purnama. (2021). PENGARUH LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK, GINI RATIO DAN PERTUMBUHAN PDRB PERKAPITA TERHADAP ANGKA KEMISKINAN DI KOTA BLITAR TAHUN 2011-2020. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*.
- Salsabil, I., & Riani, W. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan dan Laju Pertumbuhan Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2016 – 2020. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 15–24. <https://doi.org/10.29313/jrieb.v3i1.1886>
- Santoso, K. N., Abiyyi, F., Roy, A., & Marselino, K. (2022). Analisis Spasial Kemiskinan pada Masa Pemulihan Pandemi Covid-19 di Jawa Barat Tahun 2021. *Jurnal Statistika Dan Aplikasinya*, 6(2).
- Susanto, R., & Pangesti, I. (2019). PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP KEMISKINAN DI DKI JAKARTA. In *Journal of Applied Business and Economic* (Vol. 5, Issue 4).
- Yulianto, T. (2023, November 30). Memahami Kembali Strategi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia sebagai Sumber Penerimaan Negara. Kemenkeu RI Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah.